

Jokowi: Hanya Dengan Pendidikan Anak-anak Siap Masuki Masa Depan

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan selamat hari guru nasional yang diperingati Jumat (25/11). Jokowi berharap dengan pendidikan, anak-anak dapat berkompetisi di masa depan yang penuh tantangan kian berat.

"Kian ke depan, tantangan kian berat. Hanya dengan pendidikan yang baik, anak-anak kita akan siap memasuki masa depan dengan kompetisi yang baik," kata Jokowi dalam unggahannya di Instagram, Jumat (25/11).

Jokowi meminta guru menjadi tumpuan untuk memelihara anak-anak dalam mewujudkan harapan bangsa Indonesia.

"Para guru menjadi tumpuan kita untuk mempersiapkan dan menemani anak-anak bangsa menghadapi tantangan dan mewujudkan harapan kita," kata Jokowi.

Dalam ucapan selamat hari guru nasional, Presiden Jokowi sampaikan melalui karikatur yang diunggahnyanya di Instagram.

Dalam karikatur tersebut digambarkan anak-anak yang mengikuti pembelajaran di luar sekolah.

Beberapa anak-anak sedang diajari guru laki-laki dengan papan tulis. Anak-anak lainnya sedang meneliti tanaman dengan guru perempuan. Anak-anak lainnya sedang belajar mengenal ikan disekitar danau. ● me

Masa Transisi RKUHP 3 Tahun, Wamenkumham Jelaskan Alasannya

JAKARTA (IM) - Pemerintah dan Komisi III DPR telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di tingkat I, dan menyepakati untuk disahkan di tingkat II pada Rapat Paripurna DPR.

Hal ini diputuskan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) dan perwakilan lainnya, Kamis (24/1) sore.

Meskipun akan disahkan, Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan bahwa memerlukan waktu transisi sampai 3 tahun untuk melaksanakan RKUHP ini. Masa transisi ini bertumbuh dari draf sebelumnya yakni 2 tahun.

Pria yang akrab disapa Prof. Eddi ini menjelaskan, lamanya masa transisi itu lantaran ada banyaknya aturan pelaksana yang perlu dipersiapkan. Dan 3 tahun adalah batas waktu maksimal.

"Itukan banyak aturan pelaksanaan yang harus dikerjakan jadi tidak mungkin dalam satu tahun tapi ingat maksimal tiga tahun," kata Eddi kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, yang dikutip, Jumat (25/11).

Menurut Eddi, ada berbagai macam peraturan yang harus diselesaikan pemerintah, misalnya terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

"Itu akan dibuat peraturan pemerintah sebagai pedoman bagaimana pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Itu contoh konkret," terangnya.

Saat ditanya berapa jumlah peraturan turunan yang akan dibuat dari RKUHP, Eddi mengaku belum melihat detail mengenai hal itu. Yang pasti, aturan turunan hanya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) saja.

"Seingat saya hanya peraturan pemerintah," tandas Guru Besar Universitas Gajah Mada ini. ● me

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



MENTERI BUMN TINJAU KORBAN GEMPA CIANJUR
Menteri BUMN Erick Thohir berbicara dengan warga saat meninjau posko bencana Satgas BUMN di Limabangsari, Cianjur, Jawa Barat, Jumat (25/11). Menteri BUMN akan fokuskan bantuan yang dilakukan oleh 58 BUMN kepada 40 desa dari 137 desa yang terdampak bencana gempa Cianjur, serta akan membangun Puskesmas tahan gempa yang dapat dimaksimalkan sebagai posko kesehatan dan penyaluran obat-obatan ke depannya.

Tak Masalah Orang Kaya Berobat Pakai BPJS, Asal Tak Peserta PBI

Orang kaya seharusnya tidak menjadi anggota BPJS Kesehatan dari jalur PBI yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tergolong fakir miskin.

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Rahmad Handoyo menegaskan, BPJS Kesehatan ditujukan buat semua warga negara, termasuk orang kaya.

Cuma masalahnya, banyak orang kaya yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan jalur Penerima Bantuan Iuran (PBI). Padahal, PBI diperuntukkan buat rakyat miskin.

Orang kaya peserta BPJS Kesehatan jalur PBI inilah yang menjadi akar masalah sehingga BPJS Kesehatan tidak tepat sasaran.

"Bila orang kaya terus mendapatkan iuran PBI BPJS,

tentu ini salah sasaran (tidak tepat sasaran), mengingat warga yang kaya tidak seharusnya dapat iuran PBI dari pemerintah," kata Rahmad kepada wartawan, Kamis (24/11).

PBI merupakan salah satu jenis kepesertaan BPJS Kesehatan. Melansir situs BPJS Kesehatan, PBI merupakan layanan bagi peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu. Lewat jalur PBI, peserta tidak membayarkan uang iuran bulanan BPJS Kesehatan karena akan dibayarkan oleh pemerintah.

Rahmad mengatakan, diperlukan pembenahan input data PBI untuk menyelesaikan

persoalan BPJS Kesehatan yang tidak tepat sasaran. Menurutnya, melarang orang kaya pakai BPJS Kesehatan bukanlah solusi.

Pemerintah, kata dia, semestinya mengeluarkan warga kaya dari golongan PBI sehingga masyarakat berpenghasilan tinggi menjadi peserta BPJS Kesehatan jalur iuran mandiri.

"Sehingga, warga yang benar-benar membutuhkan negara, iuran PBI bagi warga yang benar-benar tidak mampu. Sedangkan warga yang kaya dibutuhkan kegotongroyongan dengan membayar mandiri iuran BPJS," ujarnya.

Rahmad mengakui bahwa dibutuhkan waktu dan kolaborasi untuk membenahi data kepesertaan BPJS Kesehatan. Diperlukan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.

"Karena praktik input data diperoleh dari pemerintah

daerah yang melibatkan data dari RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan, sampai dinas sosial setempat," kata politisi PDI-P itu.

Sebagaimana bunyi konstitusi, lanjut Rahmad, jaminan kesehatan warga negara telah diatur di Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Oleh karenanya, BPJS Kesehatan harusnya tidak dilarang untuk siapa pun, baik warga kaya maupun miskin.

"Demi kelangsungan BPJS untuk bisa terus memberikan pelayanan kesehatan sesuai amanah konstitusi dan amanah UU, maka dibutuhkan gotongroyong," katanya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Menkes Budi Gunadi Sadikin menyentil orang-orang kaya yang

berobat menggunakan BPJS Kesehatan. Dia mengungkap, BPJS Kesehatan selama ini harus menanggung beban pengobatan orang-orang yang tergolong kaya, bahkan golongan konglomerat alias orang superkaya.

Menurut Budi, mendeteksi peserta BPJS Kesehatan dari golongan kaya raya sebenarnya cukup mudah. Bermodalkan nomor NIK KTP saja, bisa ditelusuri pengeluaran kartu kredit hingga tagihan listrik rumahnya.

Meski kurang etis, Budi menilai, perilaku orang kaya yang berobat menggunakan BPJS Kesehatan tak sepenuhnya melanggar aturan. Sebab, layanan di BPJS Kesehatan belum mampu mengakomodasi semua kelas ekonomi. ● han

Bersama Warga, Prajurit Kostrad Siap Operasionalkan Bandara di Pegunungan Papua

NDUGA (IM) - Personel Satgas Yonif Raider 321/GT/13/1 Kostrad Pos Yigi bersama masyarakat Distrik Yigi, gotong royong membangun dan membersihkan Bandara, bertempat di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

Hal tersebut disampaikan Dansatgas Yonif Raider 321/GT/13/1 Kostrad, Letkol Inf Ricky J. Wuwung, S.Sos., M.I.P., dalam rilis tertulisnya di Distrik Mbuwa, Kabupaten Nduga, Papua, Jumat (25/11).

Dansatgas mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan kembali pedalaman Papua khususnya daerah Distrik Yigi yang sebelumnya sudah lama ditinggalkan oleh Warga.

"Kegiatan Gotong Royong membangun kembali bandara Yigi ini merupakan salah satu program Satgas Yonif Raider 321/GT/13/1 Kostrad yang dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu pemerintah setempat dalam mempercepat kembali pembangunan daerah Papua, khususnya di Distrik Yigi," ungkap Dansatgas.

Sementara itu, Danpos Yigi Lettu Inf Lukman Nurhuda, S.T.Han. menerangkan bahwa kegiatan membangun

kembali bandara Yigi ini adalah salah satu bentuk kepedulian dan dukungan dari Satgas Yonif Raider 321/GT/13/1 Kostrad terutama Pos Yigi dalam program pembangunan kembali daerah Distrik Yigi.

Setelah selesai melaksanakan kegiatan gotong royong, Bapak Waipen Murib (52) selaku Kepala Suku Distrik Yigi mewakili Masyarakat Yigi mengucapkan terima kasih kepada Bapak TNI Pos Yigi karena telah membantu masyarakat dalam membangun dan membersihkan Bandara Yigi.

"Terima kasih kepada Bapak Danpos Yigi, kepada TNI Pos Yigi, sudah bantu kami membersihkan bandara, semoga pembangunan bandara Yigi segera selesai sehingga bisa beroperasi kembali seperti dahulu," ujarnya.

"Ini merupakan salah satu bentuk komitmen dari Pos Yigi Satgas Yonif Raider 321/GT/13/1 Kostrad untuk senantiasa membantu mengatasi kesulitan rakyat di daerah penugasan di Papua ini, terutama daerah Distrik Yigi, semoga pembangunan kembali Bandara Yigi segera selesai sehingga bisa digunakan kembali oleh masyarakat Yigi," jelas Danpos Yigi. ● me



FOTO: ANT

PEMERIKSAAN BUPATI PEMALANG

Tersangka kasus suap, Bupati Pemalang (nonaktif) Mukti Agung Wibowo berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (25/11). Mukti diperiksa terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Bawaslu Ungkap Nama Panwascam Dicatut Menjadi Anggota Partai Politik

JAKARTA (IM) - Bawaslu menemukan sejumlah persoalan saat merekrut Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pemilu 2024. Beberapa temuan itu, di antaranya, ada Panwascam yang dicatut namanya sebagai anggota partai politik yang mendaftar ke KPU menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Kemudian, ada Panwascam yang menggunakan baju atau simbol-simbol parpol saat foto.

"Ini juga perlu diklarifikasi," kata Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu RI Herwyn Malonda, dikutip dari situs resmi Bawaslu, Jumat (25/11).

Kemudian, ada pula ASN yang mendaftar sebagai Panwascam maupun di kesekretariatan Panwascam. Menurutnya, persoalan-persoalan

ini ditemukan saat Bawaslu menerima audiensi Bawaslu daerah dari Sumatera Utara, Bali, dan Sulawesi Utara, pada Selasa (21/11) lalu.

Herwyn menyatakan, ada beberapa hal yang memerlukan klarifikasi dan identifikasi. Seperti misalnya, adanya nama Panwascam yang dicatut sebagai anggota parpol.

"(Temuan) itu kita buat klarifikasi. Misalnya, harus ada surat klarifikasi dari parpol tersebut dan KPU mencoret nama-nama yang telah dicatut dalam kepengurusan parpol di Sipol," ujarnya.

Herwyn mengaku, identifikasi masalah ini dilakukan untuk mencari jalan keluar sekaligus evaluasi untuk rekrutmen panitia pengawas ad hoc di tingkat desa/kelurahan yang akan dibuka awal 2023. ● han

Politikus PDIP Utut Adianto Penuhi Panggilan Penyidik KPK, Diduga Diperiksa soal Kasus Suap

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Utut Adianto, memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (25/11) pagi.

Ini merupakan panggilan kedua, sebab pada panggilan pertama Utut tidak datang. Politisi partai lambang banteng itu diduga bakal dimintai keterangannya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap Rektor nonaktif Universitas Lampung (Unila), Karomani (KRM).

"Iya betul. Drs Utut Adianto (Anggota DPR RI), saat ini saksi telah hadir," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (25/11).

Selain Utut, penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi lainnya, Jumat (11). Keduanya merupakan karyawan swasta, Mustopa Endi Saputra Hasibuan dan seorang pedagang, Umum Marlia.

Belum diketahui, apa yang bakal dialami penyidik dari

keterangan para saksi tersebut. Namun belakangan, KPK sedang mengembangkan kasus dugaan suap terkait penerimaan calon mahasiswa baru ini.

Sejauh ini, KPK baru menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penerimaan calon mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila) tahun 2022. Keempat tersangka tersebut yakni, Rektor nonaktif Unila, Karomani (KRM).

Kemudian, Wakil Rektor (Warek) 1 Bidang Akademik Unila, Heryandi (HY); Ketua Senat Unila, M Basri (MB); serta pihak swasta, Andi Desfiandi (AD). Karomani, Heryandi, dan Basri, ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan Andi Desfiandi, tersangka pemberi suap.

Dalam perkara ini, Karomani diduga mematok atau memasang tarif Rp100 juta hingga Rp350 juta bagi para orang tua yang menginginkan anaknya masuk di Unila. Karomani diduga telah berhasil mengumpulkan Rp5 miliar dari

tarif yang ditentukan tersebut.

Adapun, uang dugaan suap itu diterima Karomani melalui sejumlah pihak perantara, di antaranya, Heryandi dan M Basri. Salah satu pihak swasta yang menyuap Karomani yakni, Andi Desfiandi.

Atas perbuatannya, Andi selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan Karomani, Heryandi, dan M Basri, selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. ● han



FOTO: ANT

PEMBERANGKATAN SATGAS MARITIME TASK FORCE KONGA XXVIII-N/UNIFIL
Komandan Satuan Tugas (Satgas) Maritime Task Force (MTF) TNI Konga XXVIII-N/UNIFIL TA 2022 Letkol Laut (P) John David Nalasakti Sondakh melambaikan tangan saat naik ke KRI Frans Kaisiepo-368 di Koarmada II, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (25/11). TNI Angkatan Laut memberangkatkan KRI Frans Kaisiepo-368 bersama 119 personel yang terdiri dari 103 ABK, 9 kru helikopter dan 7 personel pendukung ke Lebanon untuk melaksanakan misi perdamaian dunia.

KSAU Tekankan Pentingnya Prajurit Bijak Bermedsos agar Tak Rugikan Satuan

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marshekal Fajdar Prasetyo menekankan pentingnya prajurit bijak dalam menggunakan media sosial (medsos) agar tidak merugikan satuan.

Pernyataan tersebut disampaikan Fajdar saat melakukan kunjungan kerja ke Pangkalan Udara (Lanjid) Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (24/11).

"Selalu bijak dalam penggunaan media sosial dengan memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang positif dan menghindari dampak negatif yang dapat merugikan diri sendiri dan juga satuan," kata Fajdar dalam keterangan tertulis, Jumat (25/11).

Fajdar juga menekankan pentingnya pembinaan dan peningkatan disiplin prajurit,

baik dalam kedisiplinan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, pembinaan tersebut termasuk pembinaan hubungan senior dan junior yang dibangun berlandaskan hubungan yang harmonis.

"(Hubungan senior dan junior) layaknya keluarga dengan tetap memegang teguh disiplin keprajuritan," ujarnya.

Terkait ketahanan pangan, Fajdar berharap Lanud Haluoleo dapat memanfaatkan aset serta menggandeng kelompok-kelompok tani binaan dengan tetap menaati aturan tentang pemanfaatan aset.

Dalam kunjungan ini, Fajdar juga melaksanakan peninjauan ke beberapa fasilitas sarana prasarana Lanud Haluoleo seperti pos jaga dan perkantoran sarana bantuan (Sarban). ● han

PENGUMUMAN

Berdasarkan akta Risalah Rapat Pemegang Saham PT. INDOMETAL PRATAMA MANDIRI, berkedudukan di Jakarta Barat, tertanggal 23 November 2022, Nomor 15, yang dibuat dihadapan LANNY WIDJAJA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah diadakan RUPS yang memutuskan, antara lain, Pembubaran dan Likuidasi Perseroan terhitung sejak tanggal 23 November 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut maka kami Direksi selaku likuidator memanggil segenap Kreditor dan/atau pihak ketiga yang mempunyai tagihan dan/atau keberatan atas pembubaran Perseroan tersebut, diberikan kesempatan mengajukan tagihannya dan/atau keberatannya dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal pengumuman ini kepada likuidator pada alamat berikut:

Ruko Glodok Jaya No. 75-76, Jalan Hayam Wuruk, Mangga Besar, Tamansari, Jakarta Barat.

Jakarta, 26 November 2022

LIKUIDATOR

Direksi PT. INDOMETAL PRATAMA MANDIRI